

# ARAH JUANG

## DEMOKRASI RAKYAT: SEBUAH PENGANTAR UNTUK PEMILU

peserta PEMILU 2014 karena dihambat oleh sistem dan aturan yang tidak demokratis. Sehingga PEMILU 2014 nanti dapat dikatakan sebagai PEMILU nya BORJUIS karena hanya diikuti oleh partai-partai bandit dan penipu yang meletakkan keberpihakannya bukan pada rakyat, melainkan pada modal. Oleh karena nya, siapa pun yang akan memenangkan pemilu nanti nya, mereka akan tetap menjalankan skema liberalisasi segala bidang dan eksploitasi yang memiskinkan rakyat. Dan untuk itu kami akan terus pula melawan hasil-hasil PEMILU 2014.

**Kedua**, Tetapi bukan berarti kami dan rakyat sudah tidak membutuhkan demokrasi dan pemilu sebagai ajang demokrasi. Justru karena demokrasi yang ada hari ini sangat jauh dari memadai, maka PEMILU 2014 kami yakini tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa, justru hanya akan membersihkan borok-borok partai politik yang selama ini bekerja menindas dan memiskinkan rakyat.

Oleh karena nya, dibutuhkan suatu GERAKAN ALTERNATIF yang mendorong pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari nasib bangsa dan rakyat kedepan. Partisipasi ini tidak dapat dibatasi hanya dengan memilih calon-calon yang ada, melainkan membangun satu kesatuan POLITIK ALTERNATIF untuk MELAWAN PEMILU 2014 yang berarti MELAWAN SISTEM PEMILU 2014 dan PARTAI-PARTAI PEMILU 2014, demi lahir nya PARTAI ALTERNATIF dan hadirnya pemilu yang benar-benar demokratis.

**Ketiga**, Kehadiran partai alternatif nanti sekurang-kurangnya harus mengusung program-program alternatif kerakyatan bagi perubahan bangsa dan rakyat kedepan, yakni:

1. Nasionalisasi aset-aset strategis bangsa dibawah kontrol rakyat, demi pengadaan sumber-sumber

keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Aset-aset ini berada di berbagai sektor yang semakin dimiliki oleh swasta dan asing seperti: kehutanan, kelautan, perkebunan, tambang mineral dan energi, telekomunikasi, perbankan, transportasi, pendidikan dan kesehatan.

2. Tangkap, adili dan sita kekayaan koruptor.
3. Industrialisasi nasional yang ramah lingkungan bagi kemandirian nasional dan pembukaan lapangan pekerjaan.
4. Penghapusan hutang
5. Reforma agraria sejati; yaitu melakukan tata kelola tanah dan sumber-sumber agraria yang modern dan berkeadilan.
6. Pemberlakuan upah layak nasional dan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing
7. Pemberian subsidi bagi rakyat demi : [1]. Pendidikan, kesehatan dan air minum gratis. [2]. Pangan, energi, perumahan, transportasi dan komunikasi murah.
8. Penataan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui partisipasi rakyat dan teknologi modern tepat guna.
9. Kesetaraan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya terhadap perempuan
10. Pembukaan ruang demokrasi seluas-luasnya : [1]. Pencabutan seluruh UU anti-demokrasi, termasuk merubah sistem kepartaian dan pemilu menjadi partai dan pemilu yang demokratis. [2]. Kebebasan dan solidaritas untuk keberagaman suku, agama dan ras. [3]. Kebebasan berekspresi dan berkesenian bagi pembangunan kebudayaan kerakyatan.
11. Pengadilan rakyat untuk para koruptor dan pelanggar

kejahatan kemanusiaan berat.

12. Hak referendum bagi rakyat untuk partisipasi dan kontrol kebijakan negara.
13. Pembentukan badan-badan musyawarah rakyat yang berfungsi mengawasi dan mengontrol penjalanan program-program tersebut diatas oleh pemerintahan terpilih.

**Keempat**, Mengajak dan menyerukan kepada seluruh organisasi-organisasi gerakan rakyat untuk membangun persatuan rakyat dan bersama-sama menjadi tiang pembangunan partai alternatif bagi perubahan mendasar di Indonesia.

**Kelima**, Dengan itu pula kami mengajak dan menyerukan kepada segenap unsur rakyat Indonesia yang sadar sejarah perjuangan rakyat untuk bergabung dalam gerakan alternatif ini, dengan cara:

1. Melakukan aksi dan ekspresi perlawanan di kota masing-masing yang mengusung tema "Lawan PEMILU 2014, Bangun Partai Alternatif!" serta mengangkat 13 program rakyat diatas sebagai jalan keluar rakyat Indonesia. Selanjutnya kami juga akan melakukan Aksi Serentak Nasional pada akhir Maret mendatang dan pemasangan ribuan poster di puluhan kota sebagai ajang sosialisasi kepada rakyat.
2. Mengangkat simbol-simbol perjuangan rakyat berupa gambar tokoh-tokoh pejuang rakyat seperti Wiji Thukul, Marsinah, Munir, dll, dalam bentuk kaos, poster, coretan dinding, bendera, stiker, dsb sebagai lambang perlawanan terhadap PEMILU 2014.
3. Melakukan pencoretan/penulisan program-program rakyat diatas atau tuntutan rakyat lainnya pada kertas suara dalam PEMILU DPR/DPD dan PEMILU PRESIDEN mendatang sebagai bentuk perlawanan.



**M**enjelang Pemilu 2014 yang dimulai 9 April mendatang, seluruh rakyat seakan didesak lebih keras untuk memilih wakil-wakil nya masuk ke dalam lembaga perwakilan rakyat. Instrumen "lembaga perwakilan rakyat" sendiri, jika dilihat dari sejarah, adalah bagian dari konsep *trias politika* (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang menandai berakhirnya kekuasaan monarki (kerajaan) dan berkuasanya kelas borjuis/pemodal beserta ide-ide nya tentang kekuasaan di jaman kelahiran kapitalisme. Salah satu ide yang menumbuh-kembangkan kapitalisme ditahap awal, sekaligus menjadi landasan dari *trias politika* adalah demokrasi.

Demokrasi saat itu bagai air yang menyirami gersangnya pemerintahan absolut (monarki). Namun sebenarnya, walau demokrasi sudah ada dalam bentuk pergantian kekuasaan reguler, kebebasan berpendapat dan berorganisasi, demokrasi masih memiliki watak yang 'jauh dari rakyat'. Jika di jaman kerajaan bersuara dan berpendapat yang berbeda dengan penguasa saja dilarang, di jaman demokrasi hambatan berpendapat dan bersuara memang telah banyak

berkurang (tapi tidak hilang), namun pemerintah dan wakil rakyat pun berhak untuk tidak mendengar apalagi menjalankan suara atau pendapat tersebut. Tidak ada sanksi dan hukuman bagi pemerintah atau wakil rakyat yang tidak menjalankan apa yang dijanjikan nya pada rakyat dan semua yang mengatasnamakan rakyat. Hal ini sesungguhnya wajar, karena demokrasi yang muncul dari awal sampai sekarang memang belum lah sesungguhnya dibangun dan berdasar pada kepentingan rakyat.

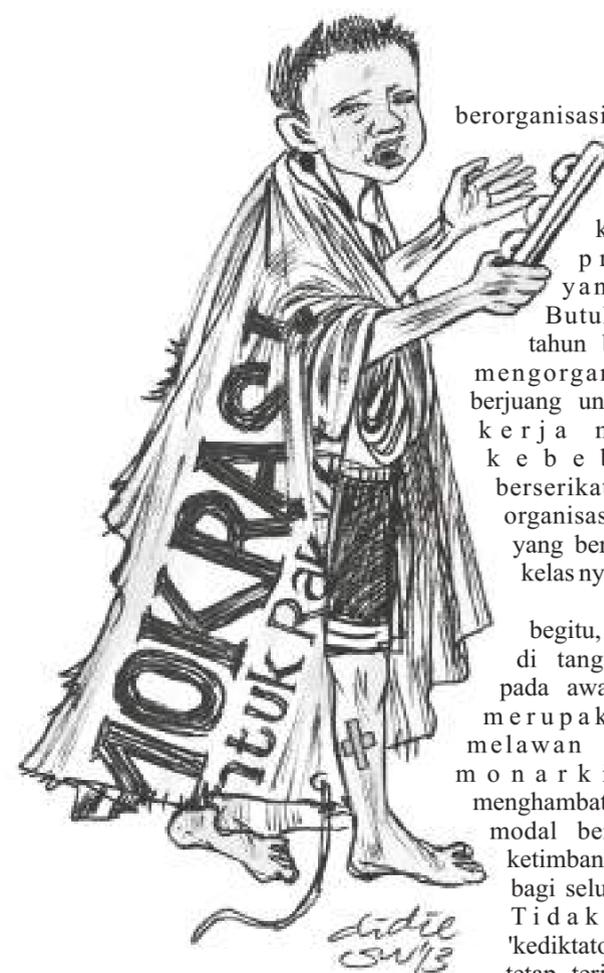
### Kapitalisme dan Demokrasi Borjuis

Demokrasi demikian sebenarnya berakar dari sistem kapitalisme. Sejak kapitalisme lahir, dimana akumulasi dan persaingan mengakibatkan terkonsentrasinya sebagian besar alat produksi di tangan segelintir orang, demokrasi lebih dulu dipraktikkan melalui kebebasan mempekerjakan anak berusia 10 tahun, kebebasan menggusur tanah petani untuk industri, dan kebebasan menentukan jam kerja yang tinggi (12-20 jam). Karena tidak memiliki alat

produksi, buruh yang harus menjual tenaga kerjanya pada pemilik alat produksi/pemodal dipaksa juga menjual hak nya dalam merencanakan dan menentukan produksi.

Dengan tersentralisasinya modal ke tangan segelintir orang dan semakin terbebasnya pemodal dari proses produksi, pemodal berkesempatan melancarkan kepentingannya untuk mengembangkan dan mempertahankan sistem ekonomi yang menguntungkan nya itu melalui negara. Negara pun akhirnya 'ditugaskan' melapangkan jalan bagi ekonomi yang menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat banyak itu. Ini sering disebut ekonomi-politik; sebab-akibat ekonomi dengan politik.

Kepemimpinan borjuis dalam negara demokrasi salah satu nya dicapai melalui kemudahan mereka mengakses perkumpulan hingga partai-partai nya yang mengusung slogan kebebasan dan persamaan. Disaat yang sama buruh dan rakyat selalu memiliki batasan waktu dan tenaga untuk berkumpul dan



berorganisasi berdasar kepentingan nya a k i b a t k e r j a p r o d u k s i yang berat. Butuh ratusan tahun bagi buruh mengorganisir diri berjuang untuk 8 jam kerja maupun kebebasan berserikat—sebagai organisasi pertama yang berdasar pada kelas nya.

Dengan begitu, demokrasi di tangan borjuis pada awalnya lebih merupakan alat melawan dominasi monarki yang menghambat keharusan modal berakumulasi ketimbang ditujukan bagi seluruh rakyat. Tidak heran, 'kediktatoran' masih tetap terjadi di lini produksi. Kaum

buruh yang berproduksi tidak mempunyai hak menentukan waktu kerja dan upah nya. Bahkan tidak punya hak pula menentukan harga barang-barang yang diproduksinya sendiri.

Sifat dari kapitalisme yang mengubah semua hal menjadi barang-dagangan juga merasuki demokrasi. Kelas buruh dan rakyat pekerja sulit mendapat akses menentukan negara karena 'berpolitik' oleh kelas borjuis dibuat sama dengan berwirausaha yang bergantung pada keberadaan modal. Dampaknya, kelas buruh 'dipaksa' untuk diwakili oleh perwakilan-perwakilan yang berasal dari borjuis dan partai-partai nya. Tapi bagaimana mungkin buruh dapat mengaspresiasi kepentingan kelas nya melalui borjuis dan instrumen politik borjuis yang menindas nya sendiri?

Borjuis/pemodal yang terlanjur memakai demokrasi kali ini tidak bisa mengelak dari fakta bahwa demokrasi yang semakin mendekat pada rakyat akan merugikan kepentingannya secara keseluruhan. Terang saja di masa-masa awal demokrasi, masih terjadi banyak batasan dan diskriminasi terhadap hak etnis/ras minoritas maupun kaum perempuan dalam hak suara pemilu, hak berorganisasi, dsb. Seluruh rakyat baru mempunyai hak setelah memperjuangkannya ratusan tahun, dan sampai sekarang, masih banyak aspek

demokrasi yang tidak benar-benar dijalankan oleh negara pemodal di banyak negara.

Kesadaran atas hal ini pula yang membuat borjuis tidak akan pernah konsisten pada demokrasi. Negara yang dikuasai kelas borjuis/pemodal akan membatasi sendiri hakikat demokrasi pada aspek-aspek yang tidak merugikan kekuasaan kelas nya. Dan karena itu pula borjuis berkepentingan membangun demokrasi yang "seakan-akan milik rakyat" melalui ilusi terhadap demokrasi perwakilan: bahwa kekuasaan harus diwakilkan, perwakilan rakyat harus pemodal/orang kaya, pergantian harus sekali 5 tahun, perubahan harus melalui sistem yang ada tanpa menggantinya, dll. Ilusi-ilusi ini bekerja mengikis kedaulatan rakyat terhadap negara.

Singkat nya, demokrasi di tangan pemodal hanyalah diperuntukkan bagi kelas nya, tapi tidak untuk diluar kelas nya (rakyat pekerja).

### Demokrasi: Untuk Rakyat!

Meningkatnya angka golput dalam 3 pemilu terakhir tidak dapat diartikan bahwa rakyat tidak butuh dan percaya lagi pada demokrasi, atau demokrasi sudah gagal. Tetapi justru tanda bahwa rakyat jenuh pada mekanisme dan isi dari demokrasi yang ada. Rakyat butuh demokrasi yang lebih esensial; yang berdaulat menentukan 'iya' dan 'tidak' pada berbagai kebijakan (melalui referendum rakyat), dan yang bertindak langsung sebagai kontrol karena sudah lelah ditipu.

Namun kedaulatan yang demikian sebaiknya memerlukan tingkat partisipasi yang lebih dari sekedar memberikan suara dan memilih wakil nya. Seluruh rakyat perlu membangun partisipasinya dalam menentukan negara melalui organisasi-organisasi dewan buruh dan dewan rakyat yang dibangun dari bawah ke atas, dan yang bekerja dan berfungsi sebagai pemerintahan. Disana lah demokrasi (nya) rakyat terjadi; demokrasi yang benar-benar dari, oleh dan untuk rakyat.

Tetapi dalam sistem demokrasi borjuis saat ini, demokrasi rakyat belum akan tercapai tanpa suatu perombakan kekuasaan menuju pemerintahan rakyat. Kaum buruh dan rakyat pekerja membutuhkan syarat yang memungkinkan nya mengakses demokrasi sampai ke lini produksi. Demokratisasi alat produksi (baca: perubahan kepemilikan atas alat produksi) akan menentukan proses demokrasi ini. Untuk itu, dibutuhkan alat politik alternatif yang berkarakter kelas buruh yang sanggup memperjuangkan keberadaan demokrasi yang demikian.

Maka sekarang, ketika pemilu dikatakan ajang demokrasi karena merupakan ajang pemilihan oleh rakyat, kedaulatan rakyat harus bertanya (pada semua calon yang masih ingin dipercayai nya): "apa guna nya memilih bagi rakyat?", "apa yang diperjuangkan untuk rakyat?", "bagaimana rakyat mengawasi dan mengevaluasi nya?", "bagaimana dengan pembangunan partai alternatif yang berdasar dan bertujuan pada kelas buruh dan rakyat tertindas?" Jika tidak ada jawaban, tidak memilih adalah jalan paling terang bagi demokrasi (nya) rakyat. (kbr)

gerakan rakyat oleh kepentingan partai-partai yang secara nyata mengabdikan pada pemilik modal. Sekaligus pula membersihkan coreng hitam sejarah partai-partai tersebut di mata rakyat banyak.

Masalah yang paling mendasar dalam perjuangan politik, yaitu keberadaan partai politik alternatif, malah diperumit oleh kepentingan politik yang berlainan dari partai-partai yang masuk ke dalam gerakan rakyat. Dan selama partai alternatif yang menaungi perjuangan kaum buruh, kaum tani dan rakyat tertindas lain belum mampu dijawab oleh kaum pergerakan, "go politik" justru lebih memicu kemunduran dibandingkan kemajuan. Gerakan rakyat dapat kehilangan banyak kader nya akibat terserap kedalam partai-partai pro

pemodal.

Jika para calon-calon aktivis tersebut tidak memberikan komitmen riil nya pada pembangunan partai alternatif, maka tugas membangun partai alternatif yang memiliki program alternatif (kerakyatan), metode alternatif (kerakyatan), dan pemimpin alternatif yang berasal dari gerakan rakyat akan semakin sulit dicapai. Untuk itu, kita membutuhkan **gerakan alternatif dalam PEMILU 2014** nanti sebagai bagian yang mendorong perluasan demokrasi politik dan percepatan pembangunan partai alternatif. Bukan buruh pilih buruh (yang masuk dalam partai pro modal), tapi buruh dan tani bangun partai politik nya sendiri. Maka dalam PEMILU 2014 nanti, tidak memilih adalah juga pilihan! (kbr)

## KOMITE POLITIK ALTERNATIF: sebuah gerakan alternatif di tengah politik naif

Di tengah menjamurnya spanduk dan brosur tentang caleg dari partai-partai pemilik modal, hadir sebuah konsolidasi politik yang berisikan puluhan organisasi yang berusaha membangun gerakan alternatif. Berawal dari diskusi umum sekber buruh, puluhan organisasi ini memahami tugas mereka untuk memberikan penjelasan seterang-terangnya pada rakyat yang sedang dikepung hegemoni pemilu borjuis bagi pencerdasan dan pembebasan politik. Ketiadaan partai (nya) rakyat yang mampu memberikan alternatif program dan metode politik kerakyatan dalam pemilu 2014 ini menjadi landasan bagi dibutuhkannya suatu alternatif politik di tengah kejenuhan rakyat pada politik borjuis. bagi mereka, ini medan yang harus dimasuki terlepas jika 'kepercayaan palsu' rakyat mayoritas masih berada dalam partai-partai borjuis. Pada tanggal 10 Maret, manifesto pun dideklarasikan oleh Komite Politik Alternatif, dan dilanjutkan dengan aksi pada 13 Maret lalu ke KPU. Berikut kutipan **Manifesto Komite Politik Alternatif**.

### LAWAN PEMILU 2014, BANGUN POLITIK ALTERNATIF

Dengan semakin mendekatnya PEMILU 2014, rakyat semakin dihadapkan pada pilihan yang tidak ada bedanya. Wajah tokoh-tokoh caleg terpampang di setiap sudut jalan dengan tulisan-tulisan

"mohon doa restu" atau "bersih, tegas, peduli", dsb. Tetapi kami tahu, dan rakyat sebenarnya tahu, tidak ada satu pun calon dan partai yang akan menjawab persoalan rakyat.

Kemunduran politik dalam PEMILU 2014 sekarang justru terjadi disaat para calon dan partai tidak lagi perlu mengusung program dan janji kepada rakyat. Kegagalan elite-elite politik dalam merealisasikan janji dan program kesejahteraan pada pemilu lalu bukan dijawab dengan



memperjelas program dan mempertegas kontrol rakyat dalam mengawal program berikut calon-calon terpilih nanti nya, tetapi justru memundurnya pada penokohan/figurisasi semata yang membodohkan melalui media-media massa. Kita rakyat Indonesia tidak bodoh!

Sebagai bentuk tanggung jawab membangun bangsa dan rakyat dalam kurungan demokrasi yang semakin diperkecil, kami merasa perlu membangun suatu gerakan alternatif

secara nasional yang mengambil sikap dan posisi tegas dalam PEMILU 2014 sekaligus memberi arah pada perjuangan rakyat ke depan nya. Maka berikut sikap dan seruan kami.

**Pertama**, PEMILU 2014 BUKAN PEMILU RAKYAT. Kesimpulan ini kami dasarkan pada kenyataan:

1. Tidak ada satu pun program politik alternatif yang pro rakyat yang diprogramkan oleh partai-partai berikut calon-calon yang tampil sebagai peserta PEMILU 2014. Kalaupun beberapa calon menjanjikan program ini dan itu, program ini tidak lebih dari sekedar 'jualan' karena tidak benar-benar mampu dijelaskan cara mencapainya. Ditambah pula dengan tidak berkapasitas nya partai-partai dan calon-calon tersebut dalam rekam jejak kepemimpinan untuk menjalankan program apapun yang mereka tawarkan.
2. Tidak ada satu pun metode politik alternatif kerakyatan yang dijalankan oleh para peserta PEMILU 2014 yang menempatkan rakyat sebagai penguasa dari calon-calon wakil dan pemimpin nya kedepan. Ini dibuktikan dengan tidak ada nya satu pun calon yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengevaluasi sampai mencopot mereka.
3. Dua hal diatas bersumber dari tidak ada nya satu pun partai alternatif kerakyatan yang tampil sebagai

**ARAH JUANG** merupakan media propaganda bersama gerakan rakyat yang diinisiasi Kongres Politik Organisasi Perjuangan Rakyat Pekerja (KPO PRP) dalam melawan Kapitalisme. Arah Juang mendorong munculnya kesadaran kelas pekerja hingga terbentuk Partai Kelas serta membangun sistem masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, yaitu Sosialisme. Karena hanya dengan menghancurkan Kapitalisme dan mewujudkan Sosialisme rakyat bisa sejahtera.

Media ini juga bisa diakses di [www.arahjuang.com](http://www.arahjuang.com). Email redaksi: [arahjuang2013@yahoo.com](mailto:arahjuang2013@yahoo.com). Telp Redaksi: 08156815133

# TOLAK PEMILU BORJUASI 2014. BANGUN ALAT POLITIK KERAKYATAN

nya kian menyusut jika dibanding pemilu sebelumnya, yaitu 15 partai (12 partai nasional, 3 partai lokal Aceh).

Ditengah kebuntuan politik sejak pemilu 1999 dalam menjawab persoalan-persoalan rakyat, sudah semakin jelas sebenarnya bahwa keberadaan partai-partai yang sekarang ini ada sangat lah tidak memadai bagi saluran aspirasi rakyat. Bahkan dapat dikatakan partai-partai tersebut bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Alasan yang paling ril dan (selalu) aktual adalah karena partai-partai yang ada hari ini tidak pernah benar-benar memperjuangkan rakyat selain lewat slogan dan bualan mereka.

Tidak perlu jauh-jauh. Dalam aspirasi/perjuangan buruh untuk menaikkan upah saja, tidak ada satu partai politik pun yang mendukung perjuangan buruh. Belum lagi terhadap permasalahan rakyat lain. Ketika pun suatu aspirasi rakyat diserap oleh wakil-wakil rakyat dari partai-partai yang ada, aspirasi tersebut tidak pernah berujung pada terjawab nya persoalan rakyat. Yang terjadi justru persoalan rakyat tersebut berubah menjadi suatu yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memenangkan rakyat.

Hal ini sebenarnya mudah ditelusuri penyebabnya. Yaitu bahwa partai-partai tersebut memang dipimpin dan dikuasai oleh para pemodal yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan buruh dan rakyat.

## Komersialisasi dan Birokratisasi Wakil Rakyat

Sudah sejak pemilu dalam sistem multi partai pertama kali digelar, yakni pada tahun 1999, sudah begitu banyak terasai kekurangan dari sistem demokrasi akibat dikuasainya DPR/DPRD oleh partai-partai para pemodal. Wakil-wakil rakyat dipilih dalam pemilu, namun 5 tahun berikutnya wakil ini justru lebih mewakili kepentingan partai. Tanpa pernah menanyakan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan rakyat, posisi rakyat dimerosotkan hanya sebagai komoditas yang “dibeli” saat pemilu, lalu dilupakan.

Oleh sistem yang mengabdikan pada modal/uang (dalam kapitalisme),

jabatan wakil rakyat pun telah diubah menjadi jabatan yang komersial bagi pengembalian dan pelipatgandaan modal/biaya yang telah mereka keluarkan bagi kampanye, dimana hal itu berdampak pada dikesampingkannya persoalan-persoalan rakyat yang tidak mendatangkan keuntungan bagi wakil rakyat. Bagi wakil rakyat yang demikian, persoalan yang paling penting adalah persoalan mengeluarkan anggaran negara bagi kesejahteraan mereka.

Ini diperparah dengan tidak adanya mekanisme kontrol dari rakyat (pemilih) terhadap wakil-wakilnya. Sehingga pada saat terpilih, wakil rakyat akan menjadi bagian yang terpisah dari rakyat. Rakyat tidak diberi cara/mekanisme untuk dapat mengevaluasi maupun mencopot wakilnya saat janji dan komitmen mereka tidak terlaksana atau menyimpang.

Bagi sebagian kecil wakil rakyat yang lebih peduli pada persoalan rakyat, mereka mungkin akan mendengar masalah rakyat dengan seksama dan penuh empati, serta memberi harapan pada rakyat. Tapi sebenarnya, penyelesaian persoalan rakyat tidak dapat dilakukan oleh mereka. Wakil-wakil rakyat yang demikian lupa dan naif bahwa persoalan rakyat tidak dapat diselesaikan hanya dengan niat baik—tanpa tahu akar persoalan dan solusi program serta metode untuk menyelesaikannya. Mereka pasti terbentur pada tembok partai yang komersial dan birokratis.

Nihilnya orientasi partai-partai tersebut pada kesejahteraan dan kemerdekaan rakyat adalah tembok utama yang menghadang semua niat baik dari sebagian kecil calon wakil rakyat yang demikian. Yang dimaksud orientasi pun tidak cukup dengan hanya membualkan janji dan program seperti “harga kebutuhan pokok yang terjangkau”, “upah yang layak”, “pendidikan gratis” dll, tanpa menjelaskan pada rakyat bagaimana cara membuat program tersebut dapat tercapai. Lebih parah pula jika program itu tidak disampaikan, maka akan semakin sulit pula (bahkan dapat dikatakan pembodohan!) bagi rakyat untuk dapat memilih dengan cerdas

lalu mengontrol wakilnya ketika terpilih.

Dalam birokratisasi partai-partai yang ada sekarang, dimana hak mencopot wakil rakyat (*recalling*) justru berada ditangan partai dan bukan berada ditangan rakyat, wakil-wakil rakyat akan terbirokratisasi sebagai 'wakil partai' daripada sebagai wakil rakyat. Sehingga, menjadi mustahil lah untuk mengharap perubahan yang penting dari calon-calon wakil rakyat ini. Justru calon-calon yang berniat baik itu yang akan berpeluang besar mengkhianati rakyat dalam sistem dan lingkungan yang kelak akan mereka temui saat terpilih sebagai wakil rakyat, yang semakin mengintegrasikan mereka kedalam partai-partai pengusung nya.

## Tidak Bisa Hanya Lihat Orangnya

Dengan bermunculan nya calon wakil rakyat yang berasal dari gerakan rakyat atau sekedar mengklaim diri sebagai aktivis ini, beberapa slogan seperti “jangan lihat partainya, tapi lihat orangnya” juga muncul. Namun sebenarnya, kata-kata tersebut lebih merupakan ilusi yang tidak akan pernah terjadi.

Dari awal berkampanye saja mereka sudah terseret ikut mengkampanyekan partai-partai yang mengusung nya (lewat hadirnya gambar-gambar partai dan tokoh partai mereka). Sedangkan disaat yang sama, caleg-caleg dari gerakan rakyat ini juga tidak menunjukkan perbedaan program dan pandangannya dengan caleg-caleg yang tidak berasal dari gerakan. Spanduk-spanduk mereka umumnya masih lah soal “mohon doa restu”, “dukung saya” dan hal remeh-temeh lain yang tidak menunjukkan program dan metode kerakyatan. Tidak ada satupun dari 'caleg-caleg aktivis' ini yang bersedia menjadi wakil rakyat sejati, yang siap keluar dari partai-partai pengusungnya, siap dievaluasi dan dicopot oleh rakyat (pemilih).

Dengan jebakan sistem politik ini, sebaik apapun niat seorang calon untuk mewakili rakyat akan berhadapan dengan partai-partai pengusung nya. Maka sekali lagi, sangat sulit membangun perubahan melalui terpilihnya mereka. Terpilihnya mereka justru memberi peluang pada terpecahnya

# PEMILU 2014 BUKAN PEMILU RAKYAT

Pemilihan Umum atau yang disingkat “Pemilu”, dimaknai sebagai alat demokrasi di zaman modern. Konon dengan pemilu-lah Rakyat diberikan ruang partisipasi untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakil mereka dimasa depan. Jika berkaca kepada proses pemilu di Indonesia, banyak kalangan yang menyebut jika pemilu tidak lebih dari sekedar label formal yang digunakan untuk melegitimasi pemimpin yang akan terpilih nantinya.

Sesungguhnya pemilu hanya menjadi sandiwara tanpa arti, dimana pemenang sudah ditentukan sebelum proses pemilu berlangsung. Coba saja tengok aturan main pemilu! Dibuat sedemikian rupa agar memudahkan individu atau kelompok tertentu, dan disisi lain justru mengebiri hak mayoritas Rakyat Indonesia. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang mendasari hal tersebut.

**Pertama**, Sejak tahun 2004, dimana sistem pemerintahan mulai mengalami pergeseran dari parlementer ke presidensial, terhitung aturan pemilu legislatif telah berganti sebanyak 3 kali. Mulai dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Ketiga produk Undang-Undang tersebut mengatur tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jika coba dibandingkan, undang-undang pemilu yang berubah-ubah tersebut pada intinya mencoba membuat pengetahuan syarat kepesertaan partai politik dalam pemilu. Artinya, hal tersebut sama saja dengan mengunci pintu hak politik rakyat untuk membangun wadah politiknya sendiri.

**Kedua**, aturan main pemilu yang tidak konsisten atau berubah-ubah, berimplikasi kepada pembatasan hak politik Rakyat. Salah satunya menyangkut syarat peserta pemilu. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikatakan bahwa “*Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya*”. Ambang batas (*parlementary threshold*) yang dipatok sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara sah secara nasional, jelas h a n y a mengakomodasi partai



-partai penguasa saja. Ini berarti partai-partai yang tidak lolos ambang batas (*non parlemen*), termasuk partai baru, harus berjibaku untuk menjadi peserta pemilu. Ini sama saja dengan membunuh partisipasi politik Rakyat dengan membebaskan syarat yang terlalu berat jika ingin menjadi peserta pemilu. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, secara tegas menyebutkan bahwa jika partai baru termasuk partai yang tidak lolos ambang batas, ingin menjadi peserta pemilu, maka harus memenuhi syarat diantaranya, berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, dll.

**Ketiga**, aturan ambang batas (*parlementary threshold*) membunuh politik lokal. Tidak semua partai-partai yang ada memiliki representasi kursi ditingkat pusat. Sebagian partai-partai peserta pemilu sebelumnya, justru m e m i l i k i keterwakilan ditingkat lokal. Jika aturan main mengenai a m b a n g b a t a s diberlakukan, maka keterwakilan mereka menjadi tidak berarti sama sekali. Kita tidak sedang membela kepentingan partai-partai peserta pemilu sebelumnya yang memiliki kursi ditingkat daerah, tetapi ingin menelanjangi bahwa aturan main pemilu hari ini memang hanya diarahkan untuk mengakomodasi partai-partai besar yang berkuasa saja.

**Keempat**, keterwakilan perempuan yang didorong oleh politik afirmatif, tidak lebih dari sekedar formalitas belaka. Permasalahan perempuan dalam ranah politik, cenderung dianggap selesai hanya dengan pendekatan kuantitas tanpa mengedepankan kualitas politik dari perjuangan kaum perempuan. Akibatnya, partai-partai politik justru

berlomba-lomba memasang calon-calon anggota legislatif yang berasal dari kaum perempuan. Tetapi hal tersebut hanya secara simbolik belaka, tanpa menekankan basis program partai yang mendorong partisipasi dan hak politik kaum perempuan secara nyata. Gejala ini terlihat dari banyaknya kaum perempuan dari kalangan artis yang dipasang sebagai caleg dipartai-partai tertentu. Dorongan popularitas seseorang dijadikan sebagai mesin pengeruk suara bagi partai-partai. Logika ini yang justru menjadikan kaum perempuan sebagai objek eksploitasi politik, ketimbang mengasah dan menempa kemampuan politik melalui kaderisasi secara matang.

Kelima, aturan main pemilu tidak cukup memuat mengenai sanksi atau paling tidak pengetatan syarat terhadap partai-partai politik yang terindikasi banyak melakukan penyimpangan. Hal ini mencakup, aturan mengenai transparansi keuangan partai politik yang lemah dan justru cenderung menjadi bias saja, termasuk pula bagaimana

sistem yang harus dipergunakan kepada kader-kader partai politik yang tersangkut kasus korupsi, pelecehan, dll. Walhasil, mereka yang tersangkut kasus-kasus hukum, justru bebas diajukan kembali mejadi anggota legislatif.

Lantas bagaimana dengan hak politik Rakyat? Aturan pemilu tidak memberikan jalan bagi terbangunnya partisipasi politik secara kongkrit. Rakyat justru masih diposisikan tidak lebih dari sekedar mesin suara (*voter gate*) saja. Ini berarti Rakyat hanya diposisikan sebagai objek, bukan sebagai entitas subjek yang berhak terlibat secara penuh dalam proses politik tersebut. Mulai dari keterlimbatan dalam membangun alat politiknya sendiri melalui partai politik, hingga dalam hal menentukan pilihannya sendiri, termasuk hak untuk tidak memilih dalam pemilu nantinya. Maka adalah hal yang wajar jika dikatakan bahwa pemilu hari ini, bukanlah pemilu untuk Rakyat, tetapi pemilu bagi kaum pemodal. Pemilu yang tidak akan menghasilkan apa-apa bagi Rakyat Indonesia.

## KENAPA MENOLAK MEMILIH?

**Fakta Tentang Elite Politik Indonesia**  
Kesimpulan: Semua Borjuis/Pemodal dan Penjahat Kemanusiaan = Tidak Akan Pro Rakyat!

Pemimpin partai / Calon Presiden	Harta Kekayaan	Dosa Politik	Status/kelas sosial
Prabowo	Rp 1,7 triliun	- Penculik aktifis 98 - Penasehat GIBAS (Ormas yang menyerang gerakan buruh di Bekasi) - Pelanggar HAM Timor-timur, dll	Mantan militer dan pengusaha
Jokowi	Rp 27,2 miliar	- Menetapkan upah murah DKI Jakarta - Perusak Lingkungan (Bisnis Mebel) - Privatisasi Air di Jakarta - Pengusuran, dll	Pengusaha
Wiranto	Rp. 81,7 miliar + USD 378.625	- Penculik Aktifis - Pelanggar HAM - Pro BBM Naik - Pro Upah Murah, dll	Mantan militer dan Pengusaha
Megawati	Rp. 256,4 miliar	- Mengesahkan sistem kerja kontrak dan outsourcing - Privatisasi BUMN - Memenjarakan Aktifis Mahasiswa - Memainkan BBM - Pro Upah Murah, dll	Pengusaha
Abu Rizal Bakri	Rp 8,19 triliun	- Penanggung jawab lumpur Lapindo - Pro Kenaikan BBM - Pro Upah Murah, dll	Pengusaha
Hatta Rajasa	Rp 14,8 miliar	- Pro Pasar Bebas (Penanggungjawab MP3EI) - Pro Kenaikan BBM, dll	Pengusaha
Anis Matta	Rp 6,4 miliar	- Pro Kenaikan BBM - Poligami - Pro Upah Murah, dll	Pengusaha
SBY	Rp. 6,8 miliar + USD 246.389	- Memainkan BBM - Pro Upah Murah - Bertanggungjawab terhadap penghalangan kebebasan beragama - Pengusuran - Perampasan tanah petani - Perusak Lingkungan - Privatisasi BUMN, dll	Mantan militer dan Pengusaha
Gita Irawan Wirjawan	Rp 397,6 miliar + USD 626.677	- Pro Kenaikan BBM - Pro Pasar Bebas (Penanggungjawab pertemuan WTO di Bali) - Mendukung semua kebijakan SBY yang anti rakyat, dll	Pengusaha
Muhaimin Iskandar	Rp 7 miliar	- Tidak berpihak Pada buruh - Pembiaran penyiksaan Buruh Migran - Mendukung semua kebijakan SBY yang anti rakyat, dll	Pengusaha
Dahlan Iskan	Rp 48,8 miliar	- Lagalisasi Outsourcing di BUMN - Pro BBM Naik - Mendukung semua kebijakan SBY yang anti rakyat, dll	Pengusaha
Surya Paloh Hary Tanoe	Rp 1,89 triliun Rp 10,95 triliun	- Anti Serikat Buruh, dll - Anti Srikat Buruh, dll	Pengusaha Pengusaha
Yusri Iha Mahendra	Rp 6,9 miliar	- Pembiaran Korupsi di Kementerian Hukum dan HAM - Tidak ada penyelesaian kasus pelanggaran HAM pada masa jabatannya, dll	Pengacara dan Pengusaha
Sutiyoso	Rp 12 miliar	- Pengusuran di DKI Jakarta - Bertanggungjawab atas peristiwa 27 Juli - Pro Upah Murah - Mendukung semua kebijakan SBY yang anti rakyat, dll	Mantan militer dan Pengusaha
Suryadharna Ali	Rp 5,9 miliar	- Pembiaran Korupsi di Kementerian Agama - Mendukung semua kebijakan SBY yang anti rakyat, dll	Pengusaha

\*Data diolah dari berbagai sumber sebelum tahun 2014 (kekayaan sangat mungkin terjadi kenaikan)

### Prestasi Korupsi Partai Politik Peserta Pemilu 2014



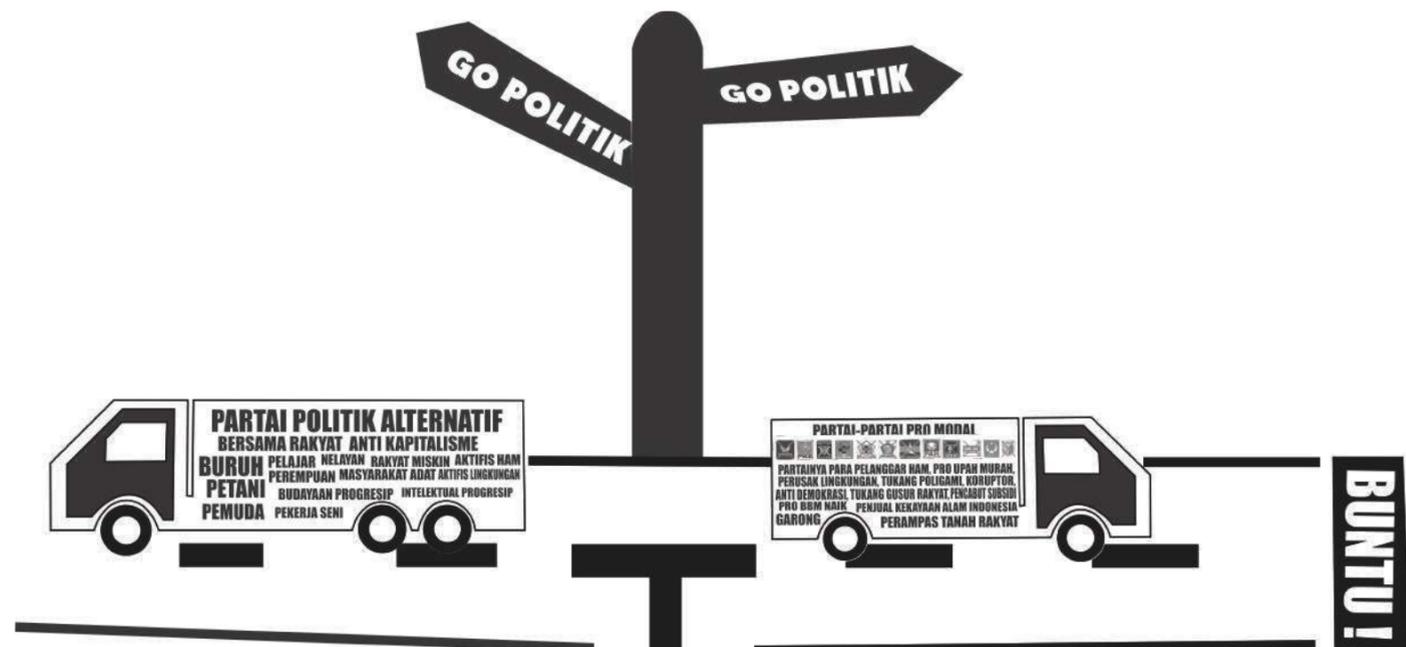
Apakah kita masih percaya sama PARTAI POLITIK yang isinya Koruptor dan tidak pernah berpihak pada kepentingan rakyat?

Dan Apakah kita akan memberikan suara dan pilihan kita pada pemimpin dan calon Presiden yang melakukan perusakan lingkungan, Anti Serikat buruh, Pelanggar HAM, Pro Kenaikan BBM, Berpoligami, Pro Upah Buruh dan tidak memihak pada BURUH dan rakyat???

Memilih pada pemilu 2014 Bukan Pilihan yang baik bagi rakyat. Pilihan bagi rakyat dan aktifis gerakan adalah MEMBANGUN ALAT POLITIK ALTERNATIF dimana Program-Programnya mampu memberikan solusi bagi persoalan rakyat hari ini, program kerakyatan.

**LAWAN PEMILU 2014, BANGUN PARTAI POLITIK ALTERNATIF**

## “Go Politik”: Apakah Dengan Cara Masuk dan Mendukung Partai-Partai Pro Modal?



### (Bukan) 5 Tahun Sekali

Tahun 2014 *katanya* tahun politik. Ini tidak sesungguhnya benar, malah dapat menyesatkan. Sebab kekuasaan beserta aspek-aspek nya, setiap tahun bahkan setiap hari, eksis di tengah masyarakat. Setiap saat itu pula aturan dan kebijakan nyata pengaruh nya pada masyarakat. Misalnya saja harga cabai yang naik atau jalan raya yang macet. Hal itu bukan terjadi tanpa adanya campur kuasa pikiran manusia, melainkan karena adanya kebijakan dan sistem yang dibuat manusia yang menyebabkan harga cabai naik atau membanjir nya kendaraan pribadi. Dan itu adalah politik. Diluar itu, sejarah juga sudah menunjukkan bahwa kekuasaan dapat berubah dan berganti tanpa adanya pemilu.

Namun jika tahun ini dikatakan tahun politik karena di tahun ini akan digelar pemilu (pergantian kekuasaan yang 5 tahun sekali itu), boleh-boleh saja, karena itu juga adalah politik. Tetapi berarti, tahun-tahun setelahnya adalah juga tahun politik yang tak dapat dipinggirkan ke belakang. Hal ini harus dibahas pertama, oleh karena kesalahan memahami 'politik' sebagai sesuatu yang ada dan terjadi hanya dalam 5 tahun sekali akan memberi sumbangan pada penjerumusan buruh, tani maupun rakyat pada 'tindakan-tindakan yang salah' dalam 'kata-kata yang benar'.

Perjuangan buruh yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan melalui 2 kali Mogok Nasional, ataupun perjuangan tani yang panjang dan gigih, sebagian nya sudah sampai pada kesimpulan bahwa rakyat harus berpolitik untuk memengaruhi kebijakan atau mengambil kekuasaan. Salah satu serikat buruh (FSPMI) bahkan sudah menyebut nya dengan “*Buruh Go Politik*.” Tentu kita harus bersepakat bahwa buruh atau rakyat pada umum nya yang berjuang demi demokrasi dan kesejahteraan harus berpolitik. Karena siapa

yang berkuasa akan menentukan kemana kebijakan akan berpihak.

Namun berpolitik yang dimaksud seharusnya tidak hanya diartikan terlibat dalam pemilu yang 5 tahun sekali. Pemilu hanyalah salah satu ajang politik, dan bukan satu-satunya. Akibat buruk dari melihat pemilu sebagai ajang yang mutlak diikuti dalam “buruh go politik” dapat berimplikasi pada ketidaksiapan infrastruktur (organisasi) dan suprastruktur (kesadaran) politik dalam menerjemahkan langkah dan praktek politik, sehingga berpotensi merusak langkah-langkah yang seharusnya diambil berikutnya: **pendidikan politik dan pembangunan partai politik**. Ini pula yang kemudian membuat beberapa organisasi rakyat maupun individu aktivis/pejuang rakyat 'memaksa diri' maju sebagai calon-calon legislatif (wakil rakyat) melalui berbagai macam partai yang ada. Ini juga berkaitan dengan sistem politik yang ada di Indonesia.

### “Go Politik” Dalam Jebakan Sistem Politik

Dalam sistem politik yang ada sekarang, rakyat sesungguhnya tidak bebas dipilih dan memilih. Rakyat hanya dapat memilih dan dipilih melalui partai-partai politik yang keikutsertaan nya sebagai peserta pemilu ditentukan oleh partai-partai dan penguasa-penguasa yang sebelum nya ada (*incumbent*) melalui aturan UU Pemilu dan UU Partai Politik yang mereka buat. Mereka membuat aturan-aturan dalam pemilu sekarang yang menyulitkan hadirnya partai-partai baru yang benar-benar berasal dari rakyat (alternatif) untuk ikut serta dalam pemilu.

Artinya, setiap orang yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat sekarang sedang dipaksa untuk masuk dalam partai-partai yang ada. Dan aspirasi rakyat sedang dipaksa disalurkan hanya kedalam partai-partai yang ada, yang jumlah